

# Analisa Hukum dan Langkah Penegakan Hak



Kajian Komprehensif atas Pelanggaran Hak Ketenagakerjaan

Kang Wahyu

# Latar Belakang Kasus: Kronologi dan Fakta Kunci

---



## Identitas Almarhum & Perusahaan

Identifikasi lengkap almarhum: nama, peran, dan riwayat pekerjaan. Nama perusahaan serta jenis usahanya. Hubungan ketenagakerjaan.



## Durasi Kerja & Perjalanan Tugas

Masa kerja almarhum, periode, dan posisi jabatan. Kronologi perjalanan tugas yang berujung sakit. Kondisi lingkungan kerja.



## Detil Sakit, Kepulangan & Meninggal

Gejala awal dan diagnosa penyakit. Proses kepulangan dan penanganan medis. Tanggal, waktu, dan penyebab resmi meninggalnya.



## Pelanggaran Hak Utama: BPJS & Lainnya

Ketiadaan jaminan sosial (BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan). Dugaan pelanggaran hak upah, cuti, atau standar keselamatan kerja.

# Analisa Hukum: Kewajiban Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang

## 1. BPJS Ketenagakerjaan

• Sanksi

Wajib mendaftarkan pekerja. Pelanggaran dapat berujung sanksi, seperti tidak mendapat layanan publik.

## 2. Tanggung Jawab Kecelakaan Kerja

Jaminan kompensasi dan perawatan medis bagi karyawan atas kecelakaan atau penyakit akibat kerja.

## 3. Hak Kematian Karyawan

Kewajiban perusahaan memberikan santunan atau jaminan kepada ahli waris jika karyawan meninggal dunia.

## 4. Pemberian Pesangon & Hak Lainnya

Memenuhi hak karyawan terkait pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak.

# Regulasi Terkait: Undang-Undang dan Peraturan Terkait



## UU No. 13 Tahun 2003

Ketenagakerjaan

- Mengatur Hak & Kewajiban Pengusaha & Pekerja
- Mencegah Konflik & Tuntutan Hukum
- Landasan Hukum Utama Hubungan Kerja



## UU No. 24 Tahun 2011

BPJS

- Membentuk BPJS Ketenagakerjaan
- Badan Hukum Publik & Bertanggung Jawab ke Presiden
- Memberikan Perlindungan Sosial bagi Pekerja



## Peraturan Pemerintah

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

- Mengatur Implementasi & Manfaat Jaminan Sosial
- Detail Program Perlindungan BPJS
- Mencakup JKK, JKM, JHT, JP



## Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan

- Aturan Teknis Pelaksanaan UU Ketenagakerjaan
- Mencakup Pedoman K3, Upah Minimum, Waktu Kerja
- Detail Prosedur & Syarat Ketenagakerjaan

# Pelanggaran yang Diduga Dilakukan Perusahaan



## Tidak Didaftarkan BPJS

Karyawan diduga tidak terdaftar dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) sesuai UU No. 24 Tahun 2011.



## Tanpa Tunjangan & Pemakaman

Keluarga tidak menerima hak tunjangan kematian dan biaya pemakaman yang seharusnya dilindungi program Jaminan Sosial.




## Hak Ketenagakerjaan Lainnya

Perusahaan diduga tidak memenuhi kewajiban pembayaran hak-hak seperti sisa gaji atau pesangon sesuai UU No. 13 Tahun 2003.



## Tanpa Konfirmasi Resmi

Belum ada konfirmasi atau penjelasan resmi dari pihak perusahaan  terkait status dan pemenuhan hak almarhum.

# Opsi Langkah Hukum yang Dapat Diambil

## **Pengaduan ke Disnaker**

Melaporkan pelanggaran ketenagakerjaan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat.

## **Proses Mediasi & Bipartit**

Upaya penyelesaian perselisihan secara musyawarah atau dengan bantuan mediator.

## **Gugatan ke PHI**

Mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Hubungan Industrial.

## **Pelaporan Pihak Berwajib**

Melaporkan unsur pidana terkait pelanggaran ketenagakerjaan kepada pihak berwajib.

# Persiapan Bukti dan Dokumen Pendukung



KTP Almarhum dan Ahli Waris



Surat Keterangan Kematian



Bukti Hubungan Kerja (Surat Jalan, Slip Gaji, dll.)



Dokumen Medis dari Klinik di Jawa Timur



Surat Kuasa dari Keluarga/Ahli Waris

*"Pengumpulan bukti yang kuat merupakan langkah krusial dalam setiap proses hukum untuk memastikan keadilan."*

# Proses Pengaduan dan Tahapan Penyelesaian

## 1. Penyusunan Surat Pengaduan Resmi

Langkah awal adalah menyusun pengaduan formal. Mengumpulkan **'bukti dan dokumen pendukung'** sangat penting untuk memvalidasi klaim dan menjadi dasar pengaduan resmi.



## 2. Pemeriksaan Mediator/Pengawas

Setelah pengaduan diajukan, mediator atau pengawas ketenagakerjaan akan memeriksa kasus. Fase ini melibatkan **peninjauan bukti** dan upaya mediasi untuk mencari resolusi.



## 3. Langkah Lanjutan Jika Mediasi Gagal

Jika mediasi tidak berhasil, kasus dapat dilanjutkan ke **jalur hukum** lebih lanjut. Ini bisa berarti litigasi formal di pengadilan hubungan industrial atau eskalasi ke otoritas yang lebih tinggi.



## 4. Peran Advokat/Penasihat Hukum

Advokat atau penasihat hukum memiliki peran krusial. Mereka memberikan **nasihat hukum**, membantu penyusunan dokumen, dan mewakili klien dalam pemeriksaan serta negosiasi.



# Potensi Sanksi Hukum bagi Perusahaan

## Sanksi Administratif

- Denda
- Peringatan Tertulis

### • Administratif

## Kewajiban Membayar Ganti Rugi

- Kompensasi Hak yang Tidak Dipenuhi
- Ganti Rugi Kerugian

### • Kompensasi

## Sanksi Pidana

- Jika Terbukti Kelalaian Berat
- Ancaman Penjara atau Denda Besar

### • Pidana

## Dampak Reputasi dan Kepercayaan Publik

- Penurunan Citra Perusahaan
- Hilangnya Kepercayaan Konsumen/Investor

### • Reputasi

# Kesimpulan dan Rekomendasi Langkah Segera



## Urgensi Tindakan Hukum

Berdasarkan temuan pelanggaran dan potensi sanksi pidana, tindakan hukum segera diperlukan. Perusahaan menghadapi risiko signifikan jika abai terhadap kewajiban.

Konsekuensi Hukum



## Pendampingan Profesional

Memastikan representasi yang kuat dan efektif. Ahli hukum menavigasi kompleksitas regulasi, mengumpulkan bukti, dan menyusun strategi terbaik.

Panduan Ahli



## Harapan Keadilan

Perjuangan ini bertujuan untuk menegakkan hak-hak almarhum Heri dan memberikan keadilan serta kompensasi yang layak bagi keluarga.

Mewujudkan Keadilan



Untuk konsultasi lebih lanjut, hubungi: [kang.wahyu@example.com](mailto:kang.wahyu@example.com)